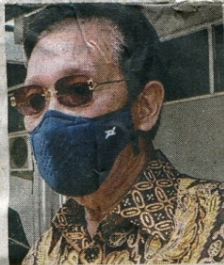




Sultan: Kuliah Luring Berisiko

■ SMA Tatap Muka Lebih Memungkinkan



YOGYA, TRIBUN - Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga 5 April 2021. Selama masa perpanjangan, pemerintah mengizinkan kegiatan kuliah tatap muka secara terbatas di perguruan tinggi.

Kendati demikian, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap bahwa keputusan untuk menggelar kuliah tatap muka cukup berisiko. Pasalnya, sebagian besar mahasiswa yang mengemban ilmu di DIY berasal dari luar daerah. Kehadiran pendatang berpotensi meningkatkan kasus terkonfirmasi Covid-19 di daerah ini.

"Belum memungkinkan karena (mahasiswa) banyak dari luar daerah. (Kasus positif) luar daerah sekarang kan baru naik."

Sri Sultan HB X

Belum memungkinkan karena (mahasiswa) banyak dari luar daerah. (Kasus positif) luar daerah sekarang kan baru naik.

DIKAJI

- Pemda DIY menilai kuliah luring saat ini cukup berisiko.
- Pasalnya, mayoritas mahasiswa adalah warga luar DIY.
- Sedangkan pemerintah pusat memberikan izin kuliah dilakukan secara luring pada PPKM kali ini.
- Pemda DIY beranggapan SMA tatap muka lebih minim risiko karena mayoritas berasal dari dalam daerah.
- Meski demikian, Pemda DIY mendukung perpanjangan PPKM untuk menekan laju penularan Covid-19.



GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

● ke halaman 7

Sultan: Kuliah

• Sambungan Hal 1

kan baru naik. Jadi malah belum tentu (perguruan tinggi akan kuliah tatap muka)," terang Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (19/3).

Sri Sultan melanjutkan, tak menutup kemungkinan jika sekolah jenjang SMA akan menggelar pembelajaran tatap muka lebih dulu. Pertimbangannya, karena mayoritas siswa yang bersekolah merupakan warga lokal.

Namun, hingga saat ini Pemda DIY masih melakukan kajian terkait kesiapan untuk menggelar sekolah tatap muka di sekolah-sekolah. "Bisa jadi malah SMA dulu yang jelas orang lokal. Ya, nanti kita pertimbangkan betul jangan malah nanti asal, terus (kasus positif) naik. Malah jadi masalah baru," tegas Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta itu menambahkan, perpanjangan PPKM mikro perlu diterapkan untuk menekan laju penularan Covid-19. Terlebih, DIY dikelilingi oleh wilayah dengan risiko penularan sedang hingga tinggi.

"Kita tetap harus ikut dari bagian itu (PPKM) karena lingkungannya masih merah. Lebih baik tetap sebagian dari PPKM tapi untuk kebebasan bisa kita atur sesuai dengan penurunan yang ada," ungkap Sultan.

Kelonggaran

Pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan hingga 5 April 2021. Melalui kebijakan ini pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini beberapa kegiatan mulai diizinkan. Di antaranya adalah kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang dapat dilakukan secara terbatas. Hanya saja kelonggaran itu terbatas hanya berlaku untuk perguruan tinggi, yakni universitas dan akademi.

"Kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka untuk perguruan tinggi/akademi yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto dalam konferensi pers da-

ring, Jumat (19/3).

Airlangga mengatakan, kegiatan belajar tatap muka hanya dapat dilakukan di perguruan tinggi/akademi. Sementara pembelajaran di tingkat SMA, SMK atau di bawahnya tetap digelar secara daring. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di perguruan tinggi/akademi dilakukan secara bertahap dan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah," ujar Airlangga.

Selain kuliah tatap muka di perguruan tinggi dan akademi, pada PPKM mikro jilid 4 ini pemerintah juga sudah mengizinkan digelar kegiatan seni budaya. Namun, kegiatan ini dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas dan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Para pekerja seni dan budaya mulai ada *opportunity* dengan dibukanya fasilitas budaya berkapasitas 25 persen," tutur dia.

Selain kedua aturan tersebut, pembatasan lain yang berlaku pada PPKM mikro jilid 4 masih sama dengan periode sebelumnya. Aturan itu berupa

pembatasan kegiatan perkantoran atau *work from office* (WFO) sebesar 50 persen, *dine in* atau makan di restoran dibatasi 50 persen dengan membolehkan layanan pesan antar, dan fasilitas umum dibatasi maksimal 50 persen.

Kemudian, pusat perbelanjaan atau mal beroperasi hingga pukul 21.00, dan sektor esensial serta konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. "Mal masih sampai jam 21.00 WIB dengan protokol kesehatan," ungkap Airlangga.

Selain diperpanjang, cakupan PPKM mikro juga diperluas menjadi 15 provinsi. Semula terdapat 10 provinsi yang menerapkan PPKM mikro yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. (**tro/Tribun Network**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005